

**ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

NOVRIZAL FAMI



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)

**OLEH:
NOVRIZAL FAMI**

Konflik sosial merupakan gejala yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat seperti misalnya perbedaan pendapat antar individu maupun kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan masing-masing dalam kehidupannya. Salah satu daerah yang terdapat konflik sosial adalah Kota Bandar Lampung pada tahun 2017, terdapat tiga kasus konflik sosial yang disebabkan oleh organisasi masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab bagaimana pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena; 1. Pada proses pemberdayaan terdapat tahap pengkapisitasan yang belum dilaksanakan dengan terstruktur karena terkendala oleh masalah pendanaan. 2. Tahapan pendayagunaan belum dilakukan karenaantisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan yang dapat merugikan antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat. Namun ada tahapan yang sudah dilakukan dengan baik yaitu tahapan penyadaran, pemerintah daerah telah melakukan tahapan tersebut dengan benar dan didukung dengan dokumen yang ada dilaporan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Organisasi Masyarakat, Konflik Sosial

ABSTRACT

ANALYSIS OF EMPOWERMENT OF INTERNAL COMMUNITY TOWARD THE PREVENTION OF SOCIAL CONFLICT (Study on the Body of National Unity and Politics of Bandar Lampung)

**BY:
NOVRIZAL FAMI**

Social conflict is a symptom that is always present in people's lives such as differences of opinion between individuals and groups of people to achieve their respective goals in their lives. One area that has social conflict is Bandar Lampung in 2017, there are three cases of social conflict caused by community organizations. This study has a purpose to answer how the empowerment of community organizations by the National Unity and Politics Agency in preventing social conflict in Bandar Lampung City. The method used in this study is a qualitative research method, data collection techniques are carried out by interview, documentation and observation.

The results of this study indicated that the empowerment of community organizations by the unity of the nation and politics in the prevention of social conflict in Bandar Lampung City had not been successfully implemented because; 1. In the empowerment process there was a capacity building stage that had not been implemented structurally because it was constrained by funding problems. 2. Utilization stages had not been carried out because of anticipation of misuse or irregularities that could be detrimental between local governments and community organizations. But there were stages that had been done well, namely the awareness stage, the local government had carried out these stages correctly and supported by existing documents in the annual activity report of the National Unity and Political Body of Bandar Lampung City.

Keywords: Empowerment, Community Organization, Social Conflict

**ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
(Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)**

Oleh

NOVRIZAL FAMI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: ANALISIS PEMBERDAYAAN
ORGANISASI MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL
(Studi pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Novrizal Fami

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1346021022

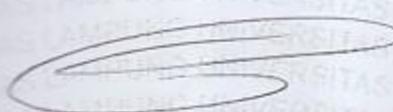
Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

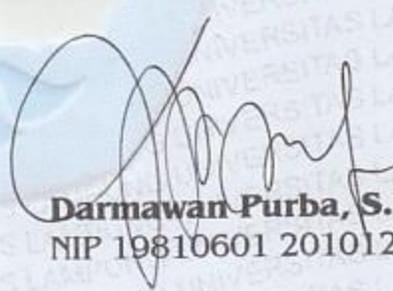
Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



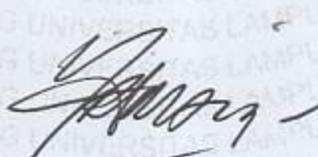

Dr. Suwondo, M.A.

NIP 19590903 198503 1 002


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.

NIP 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

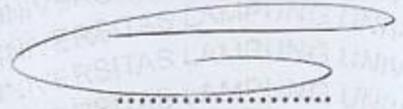

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP 19611218 198902 1 001

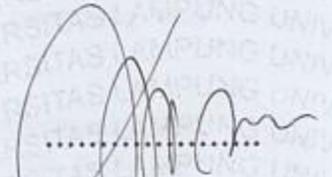
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

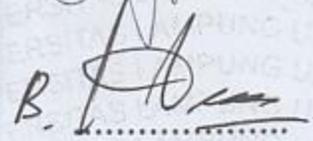
Ketua : **Dr. Suwondo, M.A.**



Sekretaris : **Darmawan Purba, S.IP., M.IP.**



Penguji Utama : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Oktober 2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Oktober 2018
Yang Membuat Pernyataan,



Novrizal Fami
NPM 1346021022

RIWAYAT HIDUP



Novrizal Fami, merupakan anak terakhir dari pasangan Bpk Ifat Salih dan Ibu Ni Komang Sucarmi, yang dilahirkan di Bunga Mayang pada tanggal 28 November 1995. Penulis memiliki dua orang kakak yakni Leo Vaisal dan Fareska Fs. Penulis berasal dari Lampung Utara tepatnya di Dusun 2 RT.004 KP. Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang, Lampung Utara.

Jenjang akademis penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 02 Negara Tulang Bawang dan menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 2 Negara Tulang Bawang dan lulus dari SLTP 2 Negara Tulang Bawang pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Metro dan lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gayabaru 6, Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

“Tidak ada yang lebih penting dari politik kecuali kemanusiaan”

{KH. ABDURRAHMAN WAHID}

**”Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”**

(Al-Baqarah, 154)

”Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

(Q.S. Huud: 88)

**”Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar. Kebodohan
adalah kebaikan yang bernasib buruk ”**

(Emha Ainun Nadjib)

PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan hasil karya yang sederhana
Untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:*

“Papa Dan Mama”

*Yang telah memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis.
Curahan kasih sayang yang tiada henti, dukungan yang tiada
banding, dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Tiada kata
yang dapat mewakili rasa syukurku atas anugerah terindah yang telah
diberikan Allah SWT kepada penulis.*

“Abang Dan Susi”

*Abang Leo Vaisal dan Sanjungan Serta Susi Fareska Fs. Terimakasih
sudah memberikan warna dalam hidup ini. Semoga kelak kalian akan
menjadi manusia-manusia yang bermanfaat.*

*Seluruh keluarga besarku dan sahabat terbaik yang
selalu memberi warna dan pelajaran padaku, dari yang
mengajarkan kepada aku arti hidup sampai membantu
dalam proses penyusunan karya yang sederhana ini .
(Izal selalu akan sayang kalian sampai kapanpun)*

*“ALMAMATERKU UNIVERSITAS LAMPUNG TERCINTA”
“Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman “*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Analisis Pemberdayaan Organisasi masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)”*** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung;
1. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung Sekaligus pembimbing yang mewakili pembimbing utama penulis untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih banyak atas segala bantuan serta limpahan ilmu yang telah bapak berikan kepada penulis, semoga bermanfaat bagi penulis kelak.
2. Bapak Darmawan Purba S.IP., M.IP. sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan kesabaran abang dalam memberikan bimbingan kepada penulis, semoga bermanfaat bagi penulis kelak.

3. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D selaku Pembimbing Akademik;
4. Bapak Dr. Suwondo, M.A selaku Dosen Pembimbing I Mahasiswa terima kasih atas kesediannya yang dengan sabar memberikan bimbingan, saran, kritik serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan semoga Allah SWT segera memberikan hidayahnya agar bapak segera pulih dan dapat beraktivitas normal kembali, amiiiiinnn;
5. Bapak Budi Harjo, S.SOS.,M.IP selaku Dosen Pembahas/Penguji yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan masukannya untuk menyempurnakan skripsi penulis.
6. Seluruh Jajaran Dosen Pengajar, Bapak Robi Cahyadi, Ibu Dwi Wahyu, Pak Agus, Pak Syarief, Pak Yana, Pak Pitojo, Pak Piping, Bapak Maulana, Bapak Denden serta dosen-dosen lain, terimakasih atas wawasan ilmu dan warna-warni kehidupan, mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Karyawan TU Fisip dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila yang membantu dan melayani urusan administrasi perkuliahan;
8. Pegawai di kantor Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung maupun Kesbangpol Provinsi Lampung yang telah memberikan izin penelitian serta bersedia memberikan banyak data dalam proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terima kasih kepada anggota ormas yang sudah memberikan informasi terkait penelitian ini.
9. Motivator besar dan yang istimewa kepada kedua Orang Tuaku, ayahandaku Ifat salih dan ibundaku Ni Komang Sucarmi S.pd Sd yang telah membesarkan, mendidik dan membimbingku dengan penuh kesabaran serta penuh kasih sayang, semoga papa dan mama selalu dalam lindungan Allah

Swt. Terima kasih atas segalanya semoga anakmu ini bisa menjadi penjamin kebahagiaan kalian berdua dunia dan akhirat.

10. Terima kasih kepada abang Leo Vaisal dan Sanjungan serta Susi Reska atas segala bantuan dan doa, motivasi serta dukungan yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebahagiaan selalu dilimpahkan untuk kita semua.
11. Orang terdekat Rahmi Intan amimy S. Ikom, Terima kasih atas segala semangat dan dukungan, serta doa yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani hari-hari penulis dari awal masuk SMA sampai menjadi Sarjana. Semoga Allah Swt kelak menjadikan orang tua kita berdua sebagai besan, amiin.
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2013, Rian adi saputra (sanak tiyuh way kanan), Mas Bima, Evan Adhyatma (Bujang Koplo), Agung Rahmat (teman satu rumah), Rendra, Toni, Tri Arista, Ardi, Irfan, Kalim, Yogi, Iqbal, Dani Pangaribowo (pasangan duet futsal dan sepak bola), Robby Ray, Irwansyah, Alam, Darma, Taufik, Kakek, Abay, Toto, Abdi, Aldo (Halah Madrid), Agung AP (salam satu Djancuks), Yones, Restu, Bimo, Idil, Kibil, Dwi, Riski, Yolanda, Amanda, Eka, Azizah, Dayu, Putri, Cici, Oca, Defa, dan seluruh teman-teman angkatan 2013 lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semua, terima kasih atas support dan bantuannya selama ini dan telah menjadi teman yang sama-sama berjuang untuk meraih gelar sarjana.
13. Untuk teman-teman KKN Gayabaru 6, Abang Alif, Bli Nyoman, Wibi Hastono, Herullah. Dinikhansa dan Vera benalu, Terima kasih atas kerja,

support, dan bantuannya selama masa KKN (40 Hari) . Sehingga penulis dapat menyelesaikan KKN dengan hasil yang memuaskan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Penulis

Novrizal Fami
NPM: 1346021022

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pemberdayaan.....	11
1. Pengertian Pemberdayaan	11
2. Prinsip-Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan.....	14
3. Tujuan Pemberdayaan	17
B. Tinjauan Organisasi Kemasyarakatan.....	21
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).....	21
2. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan	23
3. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat	24
C. Tinjauan Konflik.....	27
1. Pengertian Konflik	27
2. Bentuk Konflik	29
3. Tahap Konflik	32
4. Sumber Konflik.....	33
5. Strategi Penyelesaian Konflik.....	34
6. Manajemen Konflik	36
7. Konflik Sosial.....	37
D. Tinjauan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	39
1. Pengertian Persatuan dan Kesatuan Bangsa.....	39
2. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa.....	41
E. Kerangka Fikir	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
D. Informan.....	48
E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengolahan Data.....	52
G. Teknis Analisis Data	53
H. Teknik Keabsahan Data	54

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum.....	55
B. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung	56
C. Susunan Organisasi.....	57
D. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung.....	58

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	62
1. Tahap Penyadaran.....	66
2. Tahap Pengkapasitasan	67
3. Tahap Pendayagunaan	68
B. Pembahasan.....	70
1. Tahap Penyadaran	70
2. Tahap Pengkapasitasan	74
3. Tahap pendayagunaan	76

BAB VISIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Organisasi Masyarakat	2
Tabel 2. Data konflik antar Ormas	5
Tabel 3. Peneliti Terdahulu	8
Tabel 4. DaftarInforman.....	48
Tabel 5. Keterangan Informan	48
Tabel 6. Data primer	49
Tabel 7. Data Sekunder	50
Tabel 8. Profil Informan.....	63
Tabel 9. Triangulasi Data Penelitian.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	44
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung....	56

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung sebagai salah satu bagian dari wilayah Negara Indonesia mengalami perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat terhadap demokratisasi di daerah. Berbagai jenis organisasi masyarakat tumbuh dan berkembang dalam mengisi demokratisasi di Provinsi Lampung. Organisasi masyarakat tersebut terdiri dari organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi politik, organisasi mahasiswa, serta organisasi buruh dan lain sebagainya.

Organisasi masyarakat atau biasa disingkat ormas, merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Secara umum, misi setiap ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, adalah menyediakan pilihan-pilihan (*choice*) yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin, pada semua bidang kehidupan. Kedua, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya.

Riza N. Arfani (1996: 32) menjelaskan bahwa ormas merupakan salah satu jenis kelompok kepentingan atau kelompok penekan (*pressure group*). Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan dalam suatu sistem politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah apabila mengalami kemandekan. Aspirasi yang diperhatikan dalam hal ini adalah kepentingan yang sudah diagregasi dan diartikulasi dalam satu kelompok masyarakat. Salah satu bentuk dari kelompok masyarakat tersebut adalah organisasi masyarakat.

Perkembangan ormas di Provinsi Lampung saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut terlihat dari Setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang sudah memiliki berbagai macam golongan organisasi masyarakat, termasuk di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung pada saat ini memiliki 53 ormas yang sudah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan kesatuan bangsa dan politik Kota Bandar Lampung. Ormas tersebut terdiri dari berbagai macam golongan yaitu, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi politik dan lain sebagainya.

Tabel 1. Organisasi Masyarakat

NO	Golongan Organisasi Masyarakat	Jumlah
1	Organisasi Masyarakat Umum	10
2	Organisasi Kepemudaan	18
3	Organisasi Mahasiswa	10
4	Organisasi Keagamaan	10
5	Organisasi Sosial	5
	Jumlah	53

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, tujuan ormas adalah untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ormas mempunyai fungsi untuk mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Melihat potret keseharian ormas pada saat ini, ormas hanya sekedar bentukan kelompok yang diisi penuh oleh individu-individu ragam macamnya, tanpa melakukan kegiatan yang positif kepada masyarakat. Lebih lanjut, perilaku dan aktivitas yang dilakukan oleh anggota ormas tidak mencerminkan kewajibannya sebagai ormas. Sebagai contoh salah satu perilaku ormas yang terlihat dalam kehidupan masyarakat seperti premanisme, pemalakan, pungutan liar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ditambah dengan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini yang mengabarkan sering terjadinya bentrokan antar ormas di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga tujuan dan fungsi dari ormas kian bias dalam kehidupan masyarakat.

Provinsi Lampung akhir-akhir ini terdapat berbagai macam permasalahan dilakukan oleh ormas yang tidak sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas. Sebagai contoh permasalahan yang terjadi pada bulan juli 2017 lalu di Kota Bandar Lampung. Terdapat konflik antar ormas yang melibatkan anggota dari organisasi Tim andalan masyarakat inti lampung (Tampil) dengan organisasi pasukan elit inti rakyat (Petir) di depan gedung Dinas kesehatan Provinsi Lampung. Permasalahan bermula dari Ormas Tampil yang hendak melakukan aksi unjuk rasa yang mempersoalkan dugaan *mark up* anggaran proyek alat kesehatan (alkes) tahun 2012 dan dana APBN senilai Rp 13,5 miliar, tiba-tiba dihadang dan diserang oleh anggota dari ormas Petir.

Menurut Gindha Ansori, Kuasa hukum dari Ormas Petir menyebutkan sebagai berikut :

“Memang benar adanya penahanan dari pihak kepolisian terhadap dua anggota ormas Petir pasca keributan tersebut. Tetapi, penahanan tersebut sifatnya hanya untuk menjadi saksi guna mengumpulkan bukti-bukti dari keributan antar ormas tersebut. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa keributan tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi. “ ada miskomunikasi saja dilapangan. Sebenarnya tujuan Ormas Tampil dan Petir sama, ingin memerangi korupsi. Tapi cara yang dilakukan berbeda”.(Sumber : <https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-07/demo-dugaan-korupsi-dua-ormas-bentrok-di-depan-kantor-dinkes-lampung-dua-anggota-petir-diamankan-polisi/>.diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 21:00)

Melihat permasalahan di atas, ormas yang seharusnya berfungsi untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dalam hal ini perilaku yang dilakukan oleh ormas tidak mencerminkan fungsinya sebagai ormas, sehingga membuat permasalahan dalam kehidupan masyarakat.

Selain permasalahan konflik antar ormas diatas, pada tahun 2017 ini terdapat beberapa konflik sosial yang melibatkan anggota ormas yang terjadi di kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Data konflik antar Ormas

N0	Bulan/Tahun	Kejadian / Peristiwa
1	Juni 2017	Penusukan senjata tajam terhadap Aparat TNI oleh Anggota Ormas Pemuda Pancasila
2	Juli 2017	Bentrok antara Ormas PETIR dan Ormas TAMPIL didepan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3	September 2017	Kekerasan terhadap ojek Online yang dilakukan oleh Paguyuban / Organisasi dari Persatuan Ojek Bandar Lampung (POKBAL)

Sumber : Badan Kesatuan bangsa dan politik Kota Bandar Lampung 2017

Melihat permasalahan di atas, konflik antar ormas dapat dikatakan sebagai konflik sosial, karena konflik tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu dari individu maupun kelompok masyarakat. Konflik sosial dapat berupa konflik antar ormas, konflik antar warga, dan konflik antar suku, agama, ras dan golongan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi di suatu daerah, salah satunya konflik yang dilakukan oleh ormas tersebut.

Melihat konflik yang melibatkan organisasi masyarakat di atas, sejauh ini peran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dan instansi yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan melakukan mediasi kepada ormas yang berkonflik tersebut. Mediasi dilakukan dalam rapat tertutup dan dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Bertujuan agar ormas dari kedua belah pihak dapat berdamai dan

menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu mediasi tersebut diharapkan agar konflik antar ormas tidak terjadi lagi di Kota Bandar Lampung.

(sumber : <http://lampung.tribunnews.com/2017/07/05/herman-pimpin-mediasi-konflik-marinir-dan-ormas-pp/>. diakses pada tanggal 1 November 2017, pukul 21:46)

Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung sejauh ini menyelesaikan permasalahan konflik antar ormas dengan cara memediasi kedua ormas yang terlibat konflik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun tindakan tersebut dirasa belum cukup. Karena mediasi pada dasarnya dilakukan setelah permasalahan tersebut terjadi. Sebaiknya perlu adanya formulasi atau tindakan pencegahan konflik dari pemerintah daerah dan instansi yang terkait, agar dapat meminimalisir terjadinya konflik tersebut di masa mendatang. Pencegahan konflik tersebut dapat berupa pembinaan atau pemberdayaan kepada ormas. Dengan dilakukannya pemberdayaan, diharapkan agar ormas tersebut dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas demi menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Bangsa.

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Dalam melakukan pemberdayaan tersebut, Pemerintah/Pemerintah daerah menghormati dan

mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemberdayaan itu dapat dilakukan dengan cara fasilitasi kebijakan, melalui peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penguatan kapasitas kelembagaan, melalui penguatan manajemen organisasi, penyediaan data dan informasi, pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan, penguatan kepemimpinan dan kaderisasi, pemberian penghargaan dan penelitian dan pengembangan. Terakhir peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan atau kursus.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan terhadap ormas menjadi kewajiban pemerintah daerah atau instansi yang terkait. Karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat. Dalam hal pemerintah daerah atau instansi yang terkait dalam melakukan pemberdayaan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau biasa disebut Kesbangpol. Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kesbangpol mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, salah satunya adalah pembinaan terhadap organisasi masyarakat. Badan Kesbangpol juga mempunyai fungsi sebagai pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial yang terjadi disuatu daerah.

Tabel 3. Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Dimas Prayoga S.H (2013)	Kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan berdasarkan uu no.17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan	Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan uu no 17 tahun 2013 tentang ormas
2	Catur Wibowo (2015)	Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan Oleh pemerintah	Mendeskrripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas dan implementasi peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas
3	Mery Afriska (2017)	Pengawasan terhadap lembaga swadaya masyarakat (lsm) di kabupaten tulang bawang barat	Pengawasan terhadap aktivitas ormas dan Lsm di tulang bawang barat.

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2017

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini memfokuskan bagaimana pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah badan Kesbangpol terhadap pencegahan konflik sosial di masyarakat. Selanjutnya apakah badan Kesbangpol telah menjalankan pemberdayaan terhadap ormas tersebut dengan baik, sehingga dapat mengurangi terjadinya konflik sosial di Kota Bandar Lampung. Melihat permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis berkaitan dengan pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan Kesbangpol dalam pencegahan konflik sosial di Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat yang dilakukan

badan Kesbangpol dengan judul “Analisis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan politik serta dapat memperluas daya berpikir salah satu referensi, khususnya mengenai analisis pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait analisis pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris *empowerment* bermakna pemberian kekuasaan. *Power* bukan sekedar daya tetapi juga kekuasaan. Sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu, tetapi juga mempunyai kuasa. Kata pemberdayaan (*empower*) mengandung dua arti, pertama adalah *to give power or authority to* diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada lain. Sedangkan kedua *to give ability or enable* diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pranarka dan Moeljarto (1996:63) menyatakan pemberdayaan disebut sebagai upaya menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan dan peningkatan kemandirian. Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*), sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta mempebesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan. Mubarak (2010:33) pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu

komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat.

Sutoro Eko (2002:28), pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga dengan tiga cara pandang yang berbeda, yaitu :

- a. Pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- b. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari

manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, Sumber daya manusia, aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan.

- c. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Permendagri RI No 7 tahun 2007 pasal 1 ayat 8 tentang kader pemberdayaan masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan penjelasan di atas, inti dari pemberdayaan masyarakat adalah merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan bisa diartikan memberi kemampuan kepada orang yang lemah. Bukan hanya dalam arti tidak terbatas kemampuan ekonomi, tapi juga kemampuan lainnya yang bisa membuat orang lain berdaya seperti dalam politik, budaya, sosial, agama dan lainnya. Harus dicatat, kemampuan ini bukan hanya berarti mampu

memiliki uang, modal, tapi kekuatan atau mobilitas yang tinggi merupakan kemampuan pemberdayaan diri sendiri

2. Prinsip-Prinsip dan Tahapan Pemberdayaan

Menurut Suharto (2006:68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai *partner*.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

Konsep pemberdayaan berangkat dari asumsi yang berbeda dengan pembinaan. Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antar semua elemen masyarakat dan negara. Para ahli mengatakan bahwa pemberdayaan sangat percaya bahwa kecil itu indah, bahwa setiap orang itu mempunyai kearifan yang perlu dibangkitkan dan dihargai. Konsep pembinaan cenderung mengabaikan prinsip kearifan semua orang itu. Konteks pemberdayaan merupakan semua unsur (pejabat, perangkat negara, wakil rakyat, para ahli, politisi, orpol, ormas, LSM, pengusaha, ulama, mahasiswa, serta rakyat banyak) berada dalam posisi setara, yang tumbuh bersama melalui proses belajar bersama-sama.

Masing-masing elemen harus memahami dan menghargai kepentingan maupun perbedaan satu sama lain. Pemberdayaan tersebut dimaksudkan agar masing-masing unsur semakin meningkat kemampuannya, semakin kuat, semakin mandiri, serta memainkan perannya masing-masing tanpa

mengganggu peran yang lain. Justru dengan pemberdayaan kemampuan dan peran yang berbeda-beda tersebut tidak diseragamkan, melainkan dihargai dan dikembangkan kerjasama, sehingga bisa terjalin kerjasama yang baik.

Menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007:38), pemberdayaan adalah sebuah proses yang akan menjadi, bukan sebuah proses yang instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan serta pendayagunaan. Berikut penjelasan sederhana dari tiga tahapan tersebut.

1. Dalam tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.
2. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan life skill dari masyarakat tersebut.
3. Pada tahap pendayagunaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi

aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip dan tahapan pemberdayaan di atas, prinsip dari pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek yang kompeten dalam menjangkau sumber-sumber dan kesempatan dalam proses pemberdayaan. Sedangkan dalam tahapannya, terdapat tiga tahap yaitu penyadaran, pengkapasitasan serta pendayagunaan dalam proses pemberdayaan.

3. Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khusus kelompok rentan dan lemah agar mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*). Kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi mereka. Berikut beberapa tujuan dari pemberdayaan masyarakat :

- a. Tujuan dari pemberdayaan adalah merupakan suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.
- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial
- c. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan nama orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- d. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Menurut K. Suhendra (2006:86) tujuan pemberdayaan masyarakat dengan ciri-ciri, demokratis, kesetaraan masyarakat dengan pemerintah, kebebasan berbicara, kebebasan berkegiatan, hak untuk merencanakan, hak untuk mengelola asset lokal, hak untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan, hak untuk menikmati jariah payah sebagai buah pembangunan adalah sekaligus tujuan yang akan dituju oleh gerakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Edi Suharto (2005:60) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi

internal misal persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal misal ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil.

Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, dan masyarakat terasing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan keluarga.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan strukturak yang menghambat.
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan masyarakat kecil.
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tidak terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan seperti yang sudah dijelaskan di atas pada umumnya bertujuan untuk memperkuat kekuasaan masyarakat atau kelompok yang lemah agar mampu menguasai atau berkuasa dalam kehidupannya. Selain itu tujuan dari pemberdayaan adalah agar masyarakat dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan sehingga tidak terjatuh kedalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Dalam proses mencapai tujuan pemberdayaan tersebut, terdapat beberapa pendekatan yaitu

pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

B. Tinjauan Organisasi Kemasyarakatan

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013, ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Organisasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan ormas merupakan organisasi sosial. Organisasi sosial itu memiliki latar belakang dan atau cirri tertentu sebagai identitasnya, misalnya suku, etnis, agama atau identitas lainnya. Organisasi tersebut juga dibangun atas tujuan-tujuan tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kepentingan-kepentingan organisasi. Dengan adanya identitas dan kepentingan ini, anggota-anggota di dalamnya kemudian menginternalisasi dan

menjalankan nilai-nilai yang berlaku bagi kelompoknya, sehingga mereka atau orang-orang di luar kelompok akan memahami anggota-anggota tersebut sebagai sebuah organisasi sosial. (Gatot Eddy Pramono 2015:5 *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol, 1)

Surbakti (2007:56) menjelaskan bahwa makna dari eksistensi ormas tertuju kepada basis pergerakan kelompok kepentingan pada era sekarang ini. Kelompok kepentingan merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan sifat, kepercayaan dan/atau tujuan, yang memiliki kesepakatan bersama untuk mengorganisasikan diri dalam rangka melindungi dan mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Ethridge dan Handelman dalam buku dasar-dasar ilmu politik (Miriam budiarjo 2008:67) dijelaskan bahwa kelompok kepentingan merupakan organisasi yang bertujuan untuk melakukan proses mempengaruhi kebijakan publik yang dianggap penting bagi anggota-anggota organisasi didalamnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, organisasi masyarakat diidentikkan sebagai kelompok kepentingan, artinya organisasi yang memiliki kepentingan berdasarkan tujuan dan fungsi dibentuknya organisasi tersebut. Ormas mempunyai peran dalam kehidupan demokrasi masyarakat, antara lain memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sendiri. Mengkritisi kebijakan pemerintah agar tetap sejalan dengan tuntutan reformasi khususnya kebijakan yang

menyangkut publik melalui dialog, seminar atau kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi masyarakat memiliki tujuan dan fungsi masing-masing, namun secara khusus harus bersama-sama mencapai tujuan nasional. Mengingat ormas sangat beragam, peneliti akan menjelaskan secara umum tujuan dan fungsi dari ormas sebagai berikut :

a. Tujuan Organisasi Masyarakat

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
8. Mewujudkan tujuan negara

b. Fungsi Organisasi Masyarakat

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi

2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.
7. Pemeliharaan dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan uraian tentang tujuan dan fungsi ormas di atas, menurut peneliti tujuan dan fungsi ormas yang relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah tujuan dari ormas untuk melestarikan dan memelihara norma, nilai, etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan untuk fungsi dari ormas sendiri yaitu partisipasi masyarakat untuk dapat memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

3. Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat selain mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam rasa tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara, setiap ormas juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat, terdapat peraturan tentang hak dan kewajiban dari organisasi masyarakat, yaitu:

a. Hak organisasi masyarakat

1. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
2. Mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi
3. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka
4. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi
6. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Organisasi
7. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

b. Kewajiban organisasi masyarakat

1. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.
2. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma keasusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
3. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat
4. Melakukan keungan secara transparan dan akuntabel
5. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 diatur juga tentang hak dan kewajiban dari ormas, dimana ormas berhak :

1. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka
2. Memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi
4. Melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi
5. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi
6. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain, dan Pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi

Sedangkan Ormas berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat
4. Menjaga ketertiban umum dan teciptanya kedamaian dalam masyarakat
5. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel
6. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara

Berdasarkan uraian mengenai hak dan kewajiban ormas tersebut, menurut pandangan peneliti bahwa ormas wajib menghormati dan melaksanakan setiap peraturan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang tentang organisasi masyarakat tersebut. Diperlukan adanya peran pemerintah daerah atau lembaga yang terkait dalam memberikan pembinaan kepada ormas, agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh ormas dalam mewujudkan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang tentang organisasi masyarakat tersebut

C. Tinjauan Konflik

1. Pengertian Konflik

Ramlan Subakti (1992:149) menjelaskan bahwa konflik mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Teori Paul Conn, “*Conflict an Decision Making : An introduction to Political Science*”, yang dikutip oleh Ramlan Surbakti (1992:8), bahwa pada dasarnya politik adalah konflik, karena konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam masyarakat termasuk dalam setiap proses politik. Menurut pandangan ini, ada diantara pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berusaha keras mempertahankan apa yang selama ini telah mereka dapatkan, antara pihak yang sama-sama juga mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai.

K.W. Thomas yang dikutip oleh Stephen P. Robbins (1996:124) dalam bukunya "Perilaku Organisasi", berpendapat bahwa konflik merupakan suatu proses yang mulai bila satu pihak merasakan bahwa suatu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, atau akan segera, sesuatu yang diperhatikan pihak pertama. Sedangkan menurut Arraq Steinberg (1981:71), konflik adalah :

"Suatu proses yang kuat sekali untuk hasil yang diharapkan maupun hasil yang tidak diharapkan. Hasil yang diharapkan termasuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan unggul, yang memaksa orang untuk mencari pendekatan-pendekatan baru dan menguji kemampuannya. Hasil yang tidak diharapkan termasuk menciptakan jarak antara orang-orang, menumbuhkan rasa curiga, serta membuat mereka terasa dihina dan dikalahkan".

Konflik oleh Soerjono Soekanto (1984:63) sering diartikan sebagai suatu proses sosial dimana setiap, individu, atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang terkadang disertai ancaman atau kekerasan. Konflik memiliki banyak warna dan multidimensi, seperti yang dikatakan oleh Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana (2001:6), menjelaskan bahwa konflik banyak diperlakukan sebagai sebuah sumber bencana dan dipahami sebagai keadaan darurat yang dapat memberikan dampak negatif dalam masyarakat. Berbeda dengan pandangan tersebut, pendekatan kritis terhadap konflik lebih menempatkan konflik sebagai suatu relitas sosial dan merupakan bagian yang dibutuhkan dalam proses perubahan sosial.

Konflik secara anatomi dipahami tidak hanya memiliki satu warna atau satu dimensi saja melainkan banyak warna dan lebih dari satu dimensi

atau multidimensi. Hal ini tentu saja semakin memperkuat argumentasi bahwa konflik sesungguhnya tidak bisa dilihat dari hanya satu dimensi, melainkan sebagai kenyataan yang memiliki berbagai dimensi. Dimensi lain dari konflik yang jarang diperhatikan adalah peluang sekaligus energi bagi proses perubahan sosial. Konflik merupakan sumberdaya, maka akan senantiasa ada selama yang disebut masyarakat itu ada. Selain itu konflik juga tidak dapat dihilangkan karena akan bertentangan dengan sifat ilmiahnya.

Berdasarkan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan konflik diatas, dapat dikatakan bahwa konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Karena konflik mengandung pengertian benturan seperti misalnya perbedaan pendapat atau persaingan antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan masing-masing dalam kehidupannya. Sehingga konflik akan senantiasa muncul dalam kehidupan masyarakat dan merupakan bagian dalam proses perubahan sosial.

2. Bentuk Konflik

Secara garis besar konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

a. Berdasarkan Sifatnya

Menurut Lauer (2001:98), konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik itu terjadi bentrok-bentrok fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik poso, ambon, kupang, sambas dan lain sebagainya.
 2. Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional,. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.
- b. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik
- Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik Kusnadi (2002:67) membaginya menjadi tiga konflik yaitu :
1. Konflik vertikal, merupakan konflik anatar komponen masyarakat didalam suatu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
 2. Konflik Horizontal, merupakan konflik yang terjadi dari individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relative sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.
 3. Konflik Diagonal, merupakan konflik yang terjadi karenan adanya ketidakadilan alokasi sumber daya keseluruh organisasi

sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrem. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh.

Soekanto (1992:86) membagi konflik menjadi lima bentuk konflik, yaitu :

- a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan atau sebagainya.
- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara kelas sosial.
- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- e. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli diatas, bentuk konflik dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan posisi pelaku yang berkonflik. Berdasarkan sifatnya, dapat disimpulkan bahwa konflik muncul karena adanya perbedaan pendapat dari individu maupun kelompok yang dapat mengakibatkan hilangnya

nyawa seseorang. Namun ada beberapa perbedaan pendapat yang dapat diselesaikan, misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Sedangkan konflik berdasarkan pelakunya, konflik seperti ini sering terjadi dalam sebuah organisasi massa atau dalam sebuah perusahaan, misalnya konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor.

3. Tahap Konflik

Menurut Handyaningrat (1989:118-119) pada hakikatnya koordinasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konflik Laten/*Latent Conflict* (tersembunyi)
- b. Konflik Terasakan/*Perceiva Conflict*
- c. Konflik Diwujudkan/*Felt Conflict*
- d. Konflik Teraba/*Manifest Conflict*
- e. Akibat Konflik/*Conflict Atfermath*

Pada tahap-tahap tersebut dapat diuraikan secara berurutan bahwa pertama, konflik merupakan suatu keadaan yang potensial karena faktor individu, organisasi dan individu, organisasi dan lingkungan yang berbeda sehingga menimbulkan banyak perbedaan. Kedua, atas dasar itu individu atau kelompok mengetahui bahwa konflik dapat dirasakan adanya seperti hal pada konflik internal partai, karena pada tahap ini konflik yang muncul cenderung berpengaruh terhadap mekanisme pada supra dan infrastruktur pada partai itu sendiri. Ketiga, mereka merefleksikan melalui perbedaan opini maupun tujuan dan

nilai, dan melakukan aksi-aksi oposisi sehingga kesalahpahaman dan tidak ketidaksetujuan terjadi.

Poin keempat, konflik mulai bergerak dan berangsur-angsur mulai diwujudkan. Apabila terus berlanjut konflik dimanifestasikan dalam bentuk agresi terbuka antara pihak yang berkonflik. Kelima, akibat dari konflik ada yang menguntungkan dan merugikan, menguntungkan seperti meningkatkan kreatifitas, pertukaran ide, menemukan hal-hal baru, dan dinamisasi. Sedangkan yang merugikan akan meningkatkan rasa ketidakpuasan, stress, pergantian orang/jabatan secara tidak konstitusi, dan performansi menurun.

4. Sumber Konflik

Berdasarkan konsep konflik tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa pengertian konflik lebih banyak kepada perbedaan dan pertentangan kepentingan. Bagaimana konflik-konflik tersebut bisa timbul atau sering terjadi, hal yang menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar, karena konflik sudah tentu memiliki sebab kemunculan seperti pepatah mengatakan tidak ada asap tanpa api, pernyataan tersebut yang kemudian sering dinamakan dengan sumber konflik.

Schmuck dalam Soetopo dan Supriyanto, (1999:33) mengemukakan bahwa kategori sumber-sumber konflik terdiri dari empat yang dapat menimbulkan konflik. Pertama adanya perbedaan fungsi dalam organisasi. Kedua adanya pertentangan kekuatan antar orang dan subsistem dalam organisasi. Ketiga adanya perbedaan peranan dalam

suatu organisasi. Keempat adanya tekanan yang dipaksakan dari luar kepada organisasi.

Maurice Duverger (1988:67), lebih cenderung melihat faktor ideologi sebagai penyebab konflik. Menurutnya ideologi politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi dapat menjadi landasan berfikir dan bergerak suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya, ideologi politik dapat menjadi penuntun, pendorong, dan pengendali perilaku dan tindakan politik suatu bangsa, partai politik, bahkan individu. Dapat disimpulkan jika semakin banyak ideologi politik yang mereka anut, semakin tinggi pula peluang untuk berkonflik diantara mereka, bahkan sering terjadinya perbedaan persepsi, ide-ide atau nilai-nilai yang ingin diterapkan kepada pihak lain, yang sering disebut dengan pemaksaan kekuasaan.

5. Strategi Penyelesaian Konflik

Secara sosiologis, menurut Soetomo (1995 : 77), proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, dan solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat disasosiatif mengarah pada terciptanya nilai-nilai negatif atau sosial. Seperti kebencian, permusuhan, egoisme, pertentangan, perpecahan dan

sebaginya. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik.

Nasikun (2003 : 22) menjelaskan beberapa bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, dan koersi. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal, jika cara pertama membawa hasil. Menurut Nasikun (2003 : 25), bentuk-bentuk pengendalian ada empat, yaitu :

1. Konsiliasi (*conciliation*), pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan diantara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertengkarkan. Dalam hal ini biasa disebut pihak ketiga dari pihak-pihak yang ada dalam konflik tersebut.
2. Mediasi (*mediation*), bentuk ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa akan sepakat untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
3. Arbitrase, merupakan bentuk melalui pengendalian dengan seorang hakim (*arbiter*) sebagai pengambilan keputusan. Arbitrase berbeda dengan konsoliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, maka pihak tersebut naik banding

kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tinggi.

4. Perwasiatan, dalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan bersepakat untuk memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka.

Berdasarkan uraian diatas, strategi dalam penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui empat tahapan, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase dan perwasiatan. Konsiliasi merupakan penyelesaian dengan adanya pihak ketiga dalam suatu konflik. Mediasi merupakan bentuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak. Arbitrase merupakan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh seorang *arbiter* atau hakim, sedangkan perwasiatan merupakan adanya kesepakatan tertentu yang dapat menyelesaikan konflik.

6. Manajemen Konflik

Konflik merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mengembangkan organisasi, jika organisasi ingin terus hidup dan tumbuh, karena konflik itu sendiri tumbuh dari sebuah kedinamisan manusia dan sulit untuk dihindari dalam proses kehidupannya. Maka seni dari manajemen konflik atau seni memimpin dalam situasi dan kondisi konflik sangatlah penting dan merupakan tugas yang paling berat dan paling sukar bagi mereka terutama bagi para pemimpin. Manajemen konflik ini dilakukan bertujuan agar konflik yang akan, sedang, dan telah terjadi menjadi konflik yang sulit untuk diselesaikan dan merusak

keberlangsungan organisasi, melainkan justru organisasi mampu mengambil pelajaran atau menemukan inovasi baru dari adanya konflik tersebut.

Menurut Kartini Kartono (1998:220), manajemen konflik dapat dijalankan dengan cara sebagai berikut :

1. Membuat standar-standar penilaian
2. Menemukan masalah-masalah kontroversial dan konflik-konflik
3. Menganalisa situasi dan mengadakan evaluasi terhadap konflik
4. Memiliki tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan yang ada.

Perbedaan sikap, tujuan atau sasaran individu maupun kelompok bisa diperbesar dan diperkuat sehingga mampu memperbesar ketegangan, dan pergesekan dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan demokrasi di masyarakat. Oleh karena itu para pemimpin menemukan teknik-teknik guna merangsang konflik secara interpersonal atau kelompok, bahkan sekaligus mengendalikannya, serta mampu menyelesaikan secara sistematis tanpa menimbulkan banyak korban dan kesusahan terhadap pihak lain.

7. Konflik Sosial

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Konflik sosial merupakan berbagai masalah sosial yang menimbulkan pertentangan dalam kehidupan masyarakat atau bernegara, yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu, akibat tidak adanya rasa toleransi dan perasaan saling mengerti akan kebutuhan individu masing-masing. Penyebab munculnya sebuah konflik sosial yaitu karena adanya perbedaan yang tidak menemukan titik persamaannya, atau karena tidak didamaikan. Perbedaan yang dimaksud bisa saja berupa keyakinan, adat istiadat, pengetahuan, ciri fisik, maupun kepandaian. (Deni Zainudin 2016:12, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 No. 1)

Konflik sosial adalah suatu hal yang wajar pada masyarakat, bahkan hampir dipastikan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tidak pernah mengalami yang namanya konflik, baik itu konflik dengan skala kecil maupun konflik dalam skala besar. Konflik sosial dalam skala kecil misalnya konflik antar teman sendiri, rekan kerja, bawahan/atasan dan konflik dalam keluarga. Sedangkan konflik sosial

dalam skala besar misalnya adalah konflik antar kampung, antar golongan bahkan konflik antar keyakinan beragama.

Menurut Minnery (1985:35), konflik sosial memiliki pengertian sebagai interaksi yang terjadi di antara dua atau lebih pihak, dimana satu kelompok dan kelompok lain saling berhubungan dan saling bergantung, tetapi dipisahkan oleh adanya perbedaan pada tujuan. Sedangkan menurut Robert M. Z. Lawang (1990:78) konflik sosial merupakan suatu bentuk perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang langka, misalnya kekuasaan, nilai, status dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, konflik sosial merupakan suatu garis besar dari berbagai macam konflik yang terjadi dalam masyarakat, baik antar individu maupun kelompok. Dapat disimpulkan bahwa jika terdapat adanya konflik yang terlibat antara lebih dari satu orang maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai konflik sosial.

D. Tinjauan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

1. Pengertian Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan dan kesatuan yang kita rasakan saat ini, terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur- unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Persatuan dan kesatuan Bangsa serta kesatuan wilayah, merupakan suatu kondisi dan cara terbaik untuk mencapai tujuan bersama. Suatu masyarakat yang

didorong oleh keharusan pemenuhan kebutuhannya perlu bekerja sama atau bersatu dalam bekerja karena pada dasarnya saling membutuhkan.

Masyarakat harus memiliki jiwa kebersamaan agar dapat menghimpun kekuatan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Disamping itu, pencapaian suatu tujuan masyarakat dapat efektif bila dilakukan dalam satu tatanan atau suatu tata hubungan dalam masyarakat yang berada dalam satu kesatuan. Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sendiri diwujudkan dalam semboyan pada lambang Negara Republik Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika” yang keberadaannya berdasarkan pada PP No. 66 Tahun 1951, mengandung arti beraneka tetapi satu. Semboyan tersebut menurut Supomo (1995 : 39) menggambarkan gagasan dasar yaitu menghubungkan daerah-daerah dan suku-suku bangsa di seluruh nusantara menjadi kesatuan raya.

Menurut ST Munadjat D, (2003 : 30) dalam kehidupan masyarakat yang serba majemuk, berbangsa dan bernegara, berbagai perbedaan yang ada seperti dalam suku, agama, ras atau antar golongan, merupakan realita yang harus didayagunakan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia, menuju cita-cita nasional kita adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah- belah. Syarbaini (2010: 43) menyatakan bahwa Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi.

Persatuan Indonesia adalah persatuan yang mendiami wilayah Indonesia. Bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan Bangsa Indonesia. Bertujuan melindungi segenap Bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

Dari uraian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa Persatuan dan Kesatuan yaitu keseragaman serta bersatunya berbagai macam perbedaan, suku, agama, ras dan budaya yang berbeda disatu wilayah untuk bersama-sama mewujudkan tujuan nasional.

2. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan bentuk upaya untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam suatu persatuan dan kesatuan, serta untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa. Pengamalan nilai-nilai ini juga merupakan strategi untuk menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa agar terhindar dari adanya konflik antar individu maupun kelompok/organisasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa. Pengamalan nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah
2. Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan

3. Membangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
4. Memberikan otonomi daerah
5. Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum
6. Perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
7. Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi

Berdasarkan uraian pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia wajib menjaga dan senantiasa mentaati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu persatuan dan kesatuan agar terhindar dari berbagai konflik yang dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

E. Kerangka Fikir

Pemberdayaan merupakan cara atau upaya untuk menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, desentralisasi kekuatan serta peningkatan kemandirian kepada masyarakat maupun organisasi masyarakat. Dalam penelitian ini pemberdayaan yang dimaksud adalah ketentuan yang telah direncanakan dan sudah menjadi tugas Pemerintah daerah atau badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan permasalahan konflik sosial yang dapat menyebabkan perpecahan baik individu maupun kelompok masyarakat di Kota Bandar Lampung. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aspek pemberdayaan,

yaitu melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah, terjadi konflik antar organisasi masyarakat di depan gedung dinas kesehatan Provinsi Lampung. Konflik terjadi ketika ormas tampil yang hendak melakukan aksi unjuk rasa tiba-tiba diserang oleh anggota dari ormas petir. Menurut kuasa hukum dari ormas petir, menjelaskan bahwa konflik terjadi karena kesalahpahaman antara kedua ormas tersebut, walaupun tujuan dari kedua ormas tersebut sama-sama ingin melakukan aksi unjuk rasa. Konflik ini menjadi perhatian bagi semua pihak salah satunya pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Karena konflik tersebut dapat menjadi ancaman terjadinya perpecahan antar individu maupun kelompok masyarakat yang dapat memecahbelah persatuan dan kesatuan Bangsa, apabila tidak dilakukan pemberdayaan kepada masyarakat maupun organisasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tentang permasalahan diatas, menurut peneliti pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia jika melihat dari tiga aspek pemberdayaan. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga konsep pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan serta pendayagunaan terhadap organisasi masyarakat.

Pemerintah daerah yang dalam hal ini Badan Kesbangpol sebagai satuan kerja yang bertugas dapat melakukan pemberdayaan terhadap organisasi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari badan Kesbangpol dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor 4 tahun 2008 tentang fungsi dari badan Kesbangpol pasal 14 ayat 1 menyatakan, bahwa badan Kesbangpol mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan/pemberdayaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan Bangsa dan politik. Untuk lebih memahami penelitian ini maka akan disajikan bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena secara terperinci. Peneliti menguraikan penelitian ini dengan cara deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Menurut Lexi J Moleong (2000:14) pelaksanaan metode penelitian deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Metodelogi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif diarahkan pada latar dan individu yang teliti secara holistik (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai bagaimana pemberdayaan yang dilakukan badan Kesbangpol terhadap ormas untuk pencegahan konflik sosial di Bandar Lampung dan apa saja permasalahan yang muncul selama proses pemberdayaan sehingga membutuhkan data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Selain itu, peneliti juga ingin mendapatkan gambaran mengenai situasi dan proses pemberdayaan, apakah sudah dilakukan secara menyeluruh oleh badan Kesbangpol terhadap ormas di Lampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian bermanfaat bagi suatu pembatasan mengenai objek kajian yang diangkat. Dengan penetapan fokus yang jelas, membuat keputusan tepat tentang data yang dikumpulkan dan mana yang perlu dibuang. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terhadap ormas dalam pencegahan konflik sosial di Bandar Lampung. Peneliti menganalisis dengan menitik beratkan pada tiga tahapan pemberdayaan dalam teori pemberdayaan menurut Wrihatnolo & Dwijowijoto (2007:38) yaitu :

- a. Tahapan penyadaran, merupakan pemberian pemahaman kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan paham atau mampu dengan perilaku yang baik dan yang tidak baik. Dalam penelitian ini pemerintah memberikan penyadaran kepada ormas agar tidak berperilaku anarkis diluar dari tujuan dan fungsinya sebagai ormas.

- b. Tahapan pengkapasitasan, merupakan memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *lifeskill* dari masyarakat tersebut. Dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah memberikan pelatihan-pelatihan dan lokakarya kepada organisasi masyarakat agar dapat meningkatkan keterampilan dari anggotanya, sehingga ormas tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup ormasnya tanpa harus melakukan tindakan yang dapat menyebabkan konflik sosial di kehidupan bermasyarakat.
- c. Tahapan pendayagunaan, merupakan masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut. Dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah memberdayagunakan ormas sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Selain itu pemerintah daerah dapat melibatkan ormas dalam jalanya suatu pemerintahan.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dan waktu penelitian yang dipilih dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi dan waktu yang diambil akan membantu peneliti untuk memahami masalah penelitian.

Lokasi terkait penelitian ini adalah Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung dan beberapa ormas di Bandar Lampung. Alasan memilih lokasi tersebut karena yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap pemberdayaan ormas adalah pemerintahan daerah yang dalam hal ini diserahkan oleh Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini didasarkan pada masalah yang terjadi dilapangan. Adapun waktu pada penelitian ini, yakni pada bulan Maret 2018 hingga April 2018.

D. Informan

Informan merupakan orang yang memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan teknik *purposive*, informan dalam penelitian ini adalah Badan Kesbangpol, Polda Lampung dan 2 orang informan dari anggota ormas untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Tabel 4. Daftar Informan

No	Informan	Jumlah Informan
1	Kesbangpol	2
2	Polda Lampung	1
3	Organisasi Masyarakat	2

Sumber: Diolah peneliti pada 25 April 2018

Berdasarkan data di atas maka informan pada penelitian ini adalah 2 orang pegawai Kesbangpol, 1 orang dari pihak kepolisian, dan 2 orang dari anggota organisasi masyarakat, maka informan pada penelitian ini berjumlah 5 jiwa.

Tabel 5. Keterangan Informan

No	Nama	Jabatan	Nomor telepon
1	Fiqri Hernata	Pegawai Kesbangpol	082176546778
2	Tavina Arafah	Pegawai Kesbangpol	085269046667
3	Muhamad Daud	Kepolisian	08127945688
4	Andi	Anggota Ormas	081970890932
5	Rifai	Anggota Ormas	089624468668

Sumber: Diolah peneliti pada 25 April 2018

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif memerlukan sumber data yang sesuai dengan penelitian. Sumber data merupakan *natural setting* dalam memberikan data dan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, Koran dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2012;225), sumber data dikelompokkan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berasal dari informan dengan tujuan memberikan data yang akurat kepada peneliti. Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah pegawai Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung, pihak Kepolisian Polda Lampung, dan anggota ormas di Bandar Lampung.

Tabel 6. Data primer

No	Informan	Hasil Wawancara
1	Pegawai Kesbangpol Kota Bandar Lampung	Disimpulkan dari hasil wawancara pada tanggal 18 April 2018 pukul 10:20 WIB dengan Fiqri Hernata, Pemerintah Daerah telah melakukan pemberdayaan kepada ormas dalam pencegahan konflik sosial melalui tahapan penyadaran, pengkapasitan dan pendayagunaan.
2	Pegawai Kesbangpol Provinsi Lampung	Disimpulkan dari hasil wawancara pada tanggal 18 April pukul 13:50 WIB dengan Tavina arafah, bahwa telah berkerjasama memberikan pemberdayaan kepada ormas dalam pencegahan konflik sosial di Bandar Lampung.
3	Kepolisian Polda	Disimpulkan dari hasil wawancara pada

	lampung	tanggal 20 April 2018 pukul 09:41 WIB dengan Muhamad Daud, pihak kepolisian telah membantu memberikan pemberdayaan terhadap ormas dalam pencegahan konflik sosial berupa sosialisasi yang dilakukan di Bandar Lampung.
4	Anggota Ormas	Disimpulkan dari hasil wawancara pada tanggal 23 April 2018 pukul 09:00 WIB dengan Andi, bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemberdayaan terhadap ormas, namun hanya berupa sosialisasi tanpa adanya pelatihan atau lokakarya dan lain sebagainya.
5	Anggota Ormas	Disimpulkan dari hasil wawancara pada tanggal 23 April 2018 pukul 14:50 WIB dengan Andi, bahwa pemerintah daerah telah melakukan pemberdayaan terhadap ormas, namun hanya berupa sosialisasi tanpa adanya pelatihan atau lokakarya dan lain sebagainya.

Sumber: Diolah oleh peneliti pada 2018

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah Undang-undang, pemberitaan media cetak. Dokumen tersebut antara lain:

Undang-undang, arsip badan Kesbangpol, Perda Kota Bandar Lampung, dan pemberitaan media cetak.

Tabel 7. Data Sekunder

No	Dokumen
1	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2008
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017
3	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017
4	Arsip Badan Kesbangpol: Laporan kegiatan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat
5	Data Jumlah Ormas Di Bandar Lampung Pada Tahun 2015-2017.

Sumber: Diolah oleh peneliti pada 2018

Teknik Pengumpulan Data

Morissan (2012:26) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah metode pengumpulan data seperti *Focus Group Discussion* (FGD), pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan studi kasus.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Menurut Nazir (2011:19-195) Wawancara diartikan sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara responden dengan peneliti yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan pegawai Badan Kesbangpol, kepolisian, dan anggota organisasi masyarakat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Melalui studi dokumentasi peneliti mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berupa tulisan maupun gambar. Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen public dan dokumen pribadi seperti foto, arsip badan kesbangpol dan laporan kegiatan badan kesbangpol.

c. Observasi dilakukan guna memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi.

Rincian observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Peneliti melihat dan menjabarkan foto dari laporan kegiatan badan Kesbangpol yang berkaitan dengan pelaksanaan tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayagunaan.
- b. Peneliti mengunjungi badan Kesbangpol dan beberapa ormas di Bandar Lampung.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing Data, adalah proses dimana penulis melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam pengelompokan data yang diperlukan dalam penelitian, dan menyisihkan data-data yang tidak relevan dengan penelitian. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.

- b. Interpretasi Data, yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Morissan (2012:27) mengatakan analisis data kualitatif terdiri atas 4 tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), peragaan data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dan verifikasi.

Untuk lebih jelasnya, yaitu :

1. Reduksi Data, yakni data yang diperoleh dari lapangan dituangkan ke dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting. Dicari tema dan polanya kemudian disusun secara sistematis. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti.
2. Penyajian Data, adalah sekumpulan informasi yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yakni untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dapat dituangkan dalam berbagai macam matriks, grafik jaringan dan bagan atau bisa pula dalam bentuk naratif saja.
3. Mengambil kesimpulan
Penulis berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan harus senantiasa diuji selama peneliti berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru.

4. Verifikasi data, merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data dengan menguji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran, validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan obyektifitas. Data yang sudah teruji kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan tahap mencari arti, makna dan menjelaskan yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang *valid*. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informasi melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bandar Lampung atau yang biasa disebut Kesbangpol, merupakan badan yang memiliki struktur dan bidangnya masing-masing dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Selain itu badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Walikota Bandar Lampung dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

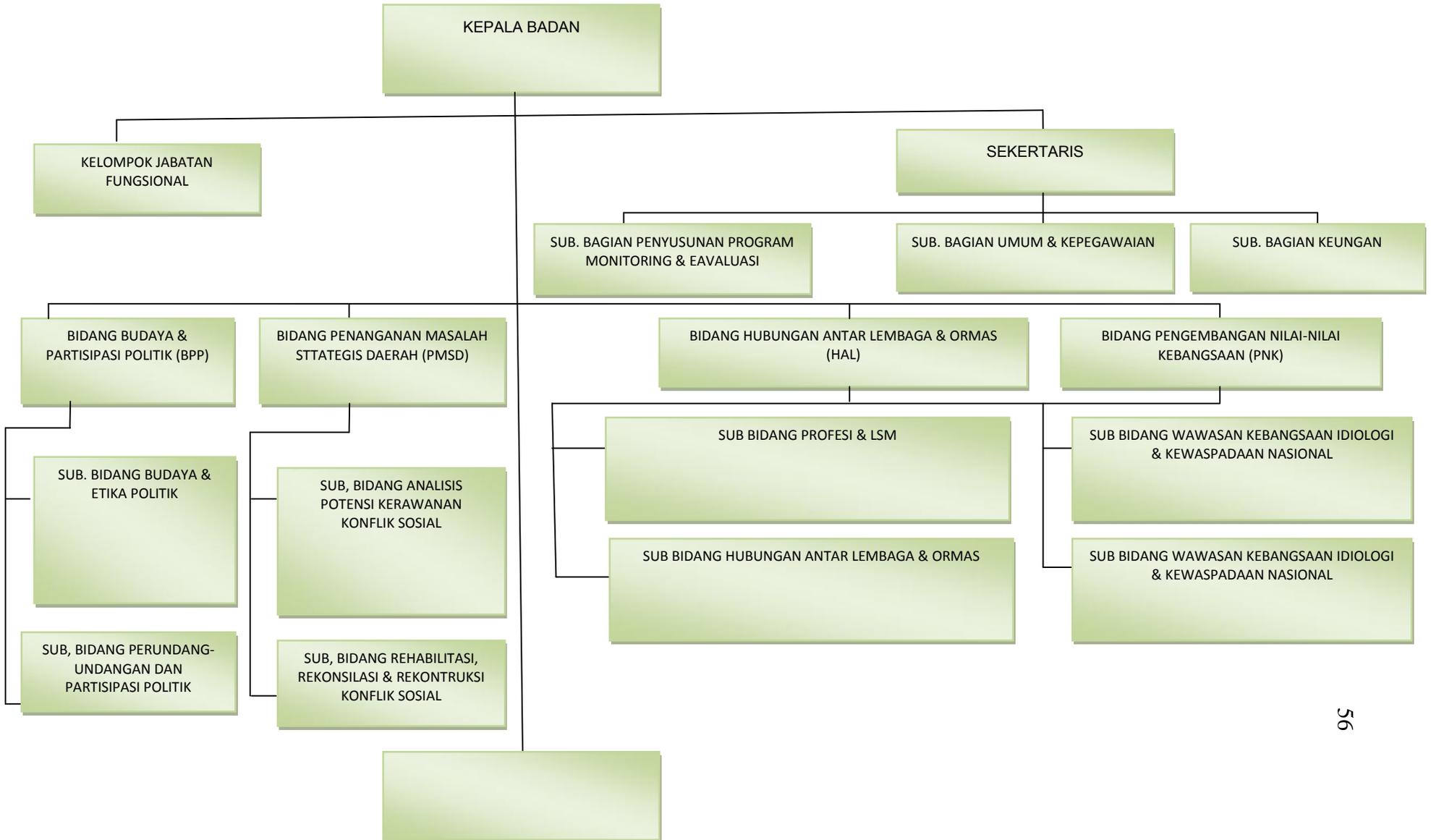
Menurut Peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 pasal 14 ayat 1 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- e. Pelayanan administratif

B. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDAR LAMPUNG



C. Susunan Organisasi

1. Kepala Badan : Drs, Suhendar Zuber, M. Si
2. Sekretaris : M. Fikri, SH. MM
 - a. Sub.Bag penyusunan program monitoring dan evaluasi :Finnon Syarif, S.Sos. MH.
 - b. Sub.bag Lembaga umum dan kepegawaian : Veronica Susi Suliati. SE.MM
 - c. Sub.bag keuangan :
3. Bidang dan Budaya Partisipasi Politik (BPP) : Ekristina, SH. MM.
 - a. Sub bidang budaya dan etika politik : Tuti Unida, S.Sos
 - b. Sub bidang perundang-undangan dan pasrtisipasi politik : Triansyah Adam, SH. MH.
4. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah : Muda Bastari, SH
 - a. Sub bidang analisis potensi kerawanan konflik sosial : Pandu Agung Wicaksono
 - b. Sub bidang rehabilitasi, rekonsiliasi dan rekontruksi konflik sosial : Fithriani Warganegara, SH
5. Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Ormas (HAL) : Ika Anita, S.sos. MM
 - a. Sub bidang profesi dan Lsm : Fiqri Hernata, SH. MH
 - b. Sub bidang hubungan antar lembaga dan ormas : Joko Irawan, S.Sos
6. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan (PNK) : Drs. Hj. Ratna Juita
 - a. Sub bidang wawasan kebangsaan, ideology & kewaspadaan nasional :
 - b. Sub bidang kewarganegaraan pranata social dan budaya bangsa : Nuri, SH

D. Visidan Misi Badan Kesbangpol Kota Bandar Lampung

Visi: Mewujudkan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dalam Kehidupan Kebangsaan Yang Demokratis Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa.

Misi:

1. Cegah dini dan tangkal dini terhadap kerawanan konflik sosial
2. Mewujudkan kehidupan berbangsa yang tentram, rukun dan damai
3. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis
4. Meningkatkan koordinasi hubungan antar lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat

Berdasarkan pernyataan mengenai gambaran umum di atas, tugas pokok dan fungsi dari badan kesbangpol yang sesuai dengan penelitian ini adalah pembinaan dan pemberdayaan serta pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan kesbangpol mempunyai visi dan misi antar lain yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah terjadinya kerawanan konflik sosial. Namun pada kenyataannya fenomena konflik sosial masih marak terjadi di Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam pencegahan konflik sosial belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Peneliti menilai bahwa selain faktor pendanaan, faktor sumber daya manusia sangat mempengaruhi dalam proses pemberdayaan sehingga pemberdayaan belum terlaksana dengan baik.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses pemberdayaan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh badan kesbangpol dalam pencegahan konflik sosial, badan kesbangpol telah melakukan beberapa tahapan pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap penyadaran. Dalam tahapan ini Badan Kesbangpol telah melakukan sosialisasi terhadap ormas, namun intensitas keberhasilannya masih sangat rendah dalam rangka pencegahan konflik sosial di Bandar Lampung.
- b. Tahap pengkapasitasan. Dalam tahap ini badan Kesbangpol belum melaksanakan tahapan pengkapasitasan dengan baik. Karena terkendala oleh masalah pendanaan.
- c. Tahapan pendayagunaan. Dalam tahapan ini belum dilaksanakan dengan baik oleh badan Kesbangpol karena terkendala oleh adanya indikasi bahwa masih terdapat banyak ormas yang berperilaku diluar tujuan dan fungsinya sebagai ormas, sehingga dapat menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut tentang Analisis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Sosial (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung) yaitu,:

1. Tahap penyadaran. Dalam tahap ini Badan Kesbangpol sebaiknya meningkatkan porsi sosialisasi terhadap ormas dari yang sebelumnya telah dilakukan.
2. Tahap pengkapasitasan, Badan Kesbangpol harus membuat pendanaan khusus untuk proses pemberdayaan ormas, bukan hanya sekedar bantuan. Karena dalam proses pemberdayaan, semua tahapan harus dilaksanakan dengan baik.
3. Tahap pendayagunaan. Dalam hal ini Badan Kesbangpol wajib untuk memberdayagunakan ormas sebagaimana dengan tujuan dan fungsi ormas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdi, Rianse.2009. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*.Bandung : CV. ALFABETA
- Arikunto, Suharsimi. 2005. :*Manajemen Penelitian*. Jakarta. PT RINEKA CIPTA
- Budiardjo, Miriam. 2008 :*Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia
pustaka utama
- Boedhi Wijardjo dan Herlambang Perdana, 2001 : *Reclaiming dan KedauletatanRakyat*, YLBHI dan RACA institute
- Danandjaja. 2012. :*Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta. GRAHA ILMU
- Efriza. 2012. *Political Explore : Sebuah Kajian Ilmu Politik* . Bandung
ALFABETA
- Handyaningrat. 1989. *Manajemen Konflik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Isbandi Rukminto Adi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat danIntervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*).Edisi Revisi. Jakarta: FE UI.
- Johnson, Doyle P diterj. Robert M.Z.Lawang,1990 : *Teori Sosiologi Klasik Moder*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kusnadi, 2002 :*Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan SumberdayaPerikanan*, LKIS, Yogyakarta.
- Morissan.2012 : *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. PRENADA MEDIA GROUP
- Rawls, Machiavelli. 2003 :*Political Theory*. Jakarta. RAJAWALI PRESS
- Mubarak, Z., 2010 : *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas*. Pada Kegiatan Pnpm Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang

- Pranarka dan Vidhandika Moeljarto : *Pemberdayaan (Empowerment)*. dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds), 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta,
- Robbins, Stephen 1996 : *Prilaku Organisasi*. Jakarta, prehallindo
- Rohaniyah, Yoyoh dan Efriza 2015. *Pengantar Ilmu Politik : kajian mendasar ilmu politik* Malang, Intrans Publishing
- Soekanto, Soerdjono, 1981 : *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Surbakti, Ramlan. 2007 : *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. : *METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta. PUSTAKA BARU PRESS
- Suharto, Edi. 2006 : *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung, Refika Aditama
- Suhendra, K, 2006 : *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta
- Thoha, Miftah. 1993 : *PEMBINAAN ORGANISASI* . Jakarta. PT RAJA GRAFINDO PERSADA
- Widayatun, Rusmi, Tri 1999. *Ilmu perilaku : M.A.104*. Denpasar. CV AGUNG SETO
- Wrihatnolo, R.R., dan Dwidjowijoto, R.N., 2007 : *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. PT ELEMEDIAKOMPUTINDO, Jakarta

Dokumen :

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat
- Perpu No. 2 Tahun 2017 turunan dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013
- Perda No. 4 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan, Politik Kota Bandar Lampung

Jurnal dan Website :

Sugiri, Lasiman. 2016. *Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*.

Vol. 1.

Pramono, Eddy, Gatot. 2015. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. 1.

Zainudin, Deni. 2016. *Jurnal Hak Asasi Manusia*. Vol. 7. No. 1.

https://www.kompasiana.com/satriya1998/uu-nomor-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan-perlu-dipahami_55283e116ea83401178b4576

<https://putra5bendang.wordpress.com/2011/11/27/pembinaan-organisasi-dan-proses-perubahan/>

<http://asimpimpinorganisasi.blogspot.co.id/2016/12/pengembangan-pembinaan-organisasi.html>

<https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-07/demo-dugaan-korupsi-dua-ormas-bentrok-di-depan-kantor-dinkes-lampung-dua-anggota-petir-diamankan-polisi/>